

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Rapat ke : 4
- Masa Persidangan : I
- Tahun : 2019
- Pada hari : Kamis
- Tanggal : 25 April 2019
- Dimulai pada jam : 10.20 WIB.
- Sampai dengan jam : 12.30 WIB.
- Pimpinan Rapat : 1. M.Subchan Bazari - Ketua
2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua
3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
4. Akhmat Masfudin - Wakil Ketua
- Sekretaris Rapat : Agus Munadi. S.Sos. M.Si - Sekretaris DPRD
- Jumlah hadir : 32 orang dari 45 orang anggota DPRD
- Tidak hadir : 13 orang anggota DPRD
- Acara :
1. Pembukaan;
 2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Hasil Pembahasan Pansus I)
 3. Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Hasil Pembahasan Pansus 2)
 4. Penutup.

Pimpinan Rapat : M. Subchan Bazari

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut

Pimpinan Rapat :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Saudara Bupati Temanggung;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; atau yang mewakili

Yth. Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah para Asisten dan Staf Ahli Bupati;

Saudara Inspektur Kabupaten Temanggung;

Para Kepala Dinas Daerah;

Para Kepala Badan Daerah ;

Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;

Para Camat;

Ketua dan Sekretaris KPU;

Ketua PANWASLU;

Para Direktur BUMD.

Segenap hadirin, pemerhati Dewan, teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat paripurna DPRD dalam rangka melanjutkan Pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 .

Terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Saudara Bupati Temanggung, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, para anggota DPRD dan semua pihak yang telah hadir memenuhi undangan kami sehingga memungkinkan rapat paripurna DPRD hari ini dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 32 anggota. Maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, rapat paripurna telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Seraya memohon ridlo Allah SWT teriring bacaan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan ke I Tahun 2019 hari ini Kamis tanggal 25

April 2019, pukul 10.20 WIB. Dengan resmi kami buka serta terbuka untuk umum ---
- ketuk palu 3 kali.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini mengambil acara dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Hasil Pembahasan Pansus I)
3. Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Hasil Pembahasan Pansus 2)
4. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu1 kali) Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019, DPRD telah menyerahkan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman kepada Pansus 1 DPRD dan Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 kepada Pansus 2 DPRD.

Selanjutnya sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dengan Nomor 05/Bamus/IV/2019 tanggal 4 April 2019, hari ini akan kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1 dan Laporan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung tentang hasil pembahasan Rancangan Perda-perda dimaksud dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Mengawali acara tersebut, kami persilahkan kepada Panitia Khusus 1 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasannya. Kami persilahkan.

LAPORAN PANSUS 1 DPRD

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus 1 Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Prasarana Sarana Unilitas Umum Perumahan dan kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua Dewan

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yth. Anggota Forum Kordinasi Pimpinan Daerah atau yang Mewakili

Yth. Seketaris Daerah, para Asisten Seketaris Daerah dan Para Kepala Bagian di Lingkungan Seketaris Daerah

Yth. Para Kepala OPD, para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Yth. Camat Se-Kabupaten Temanggung

Yth. Para Anggota Dewan kawan-kawan Pers LSM dan Pemerhati Dewan Serta Tamu Undangan dan Hadirin yang Berbahagia

Alhamdulillahirobilalamin Kita Bersyukur Kepada Allah atas Kenikmatan yang Kita terima dan mudah-mudahan Kita bisa memanfaatkan kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan Salam Kita Sampaikan Kepada Junjungan nabi Agung Muhammad SAW, para kjabatnya, para sahabatnya dan mudah-mudahan juga kita semua mendapat limpahan sholawat dari nabu Muhammad SAW.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa Pansus 1 telah melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Umum perumahan dan kawasan Permukiman serta Raperda tentang penaggulangan kemiskinan secara optimal, dan sebagai laporan, perkenankanlah kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Yang Pertama, Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ini Bertujuan untuk Menjamin Keberlanjutan Pembeliharaan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

Yang Kedua, Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan Bertujuan Untuk :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Mengembangkan Kemampuan dasar Serta Kemampuan Berusaha Masyarakat miskin
2. Meningkatkan Peran Masyarakat miskin dalam pengambilan Keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar
3. Terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
4. Terwujudnya rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentang miskin.
5. Menurunkan angka kemiskinan.

Yang Ketiga, Bahwa penuntasan kemiskninan harus berkolaborasi dengan dunia usaha khususnya melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk itu kami mendorong agar forum CSR Kabupaten Temanggung segera di optimalisasikan untuk ikut ambil bagian dalam mempercepat penurunan angka kemiskninan di Kabupaten Temanggung.

Yang keempat, bahwa dengan ada Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan ini harapannya dapat mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat bersinergi dengan tujuan berdasarkan strategi peneggulangan kemiskinan.

Yang kelima, sudah menjadi sebuah keharusan bahwa sebuah Peraturan daerah dilengkapi dengan Peraturan Bupati. Sebab didalam sebuah Perda, hanya membahas secara garis besar saja, sehingga untuk penjelasan dan pelaksanaan teknis dilapangan, menggunakan Perbup yang merangkum tata cara dan teknis secara mendetail. Oleh karena itu kami berharap, agar setelah Peraturan Daerah ini disyahkan, segera dilengkapi dengan Peraturan Bupati agar Peraturan Daerah ini dapat segera diimplementasikan.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANSUS 1 OLEH BADRUN MUSTOFA. S.Pd

Selanjutnya kami bacakan keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Pansus 1/IV/2019 Tentang Pembahasan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung Tentang penanggulangan kemiskninan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang pedoman penyerahan prasarana sarana utilitas umum, perumahan, dan kawasan permukiman. DPRD Kabupaten Temanggung panitia khusus 1 menimbang

- a. Bahwa berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 3 Th 2019 tanggal 4 april 2019 panitia khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang penanggulangan kemiskinan rancangan pengaturan daerah Kabupaten Temanggung tentang pedoman penyerahan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman bersama organisasi perangkat daerah Kabupaten Temanggung dan tim penyusun rancangan peraturan daerah dimaksud.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A Perlu menetapkan keputusan panitia khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung tentang pembahasan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang penanggulangan kemiskinan rancangan pengaturan daerah Kabupaten Temanggung tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman meningat 1 dan seterusnya.

Memperhatikan pembicaraan saran dan pendapat para anggota panitia khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang penanggulangan kemiskninan.

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang pedoman penyerahan prasarana sarana unitilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dalam rapatnya pada tanggal 5,8,9 dan 22,23,24 April 2019 yang dihadiri oleh legislatif:

1. Badrun Mustofa Spd (ketua)
2. Umi Tusaibah SAg,Msi (wakil ketua)
3. Elinawati Spd (sekertaris)
4. Drs Titik Winarti (anggota)
5. H Agung Priowidodo (anggota)
6. H JARYONO B A (Anggota)
7. Iman Bintoro ST (anggota)
8. Niken Ratnawati (anggota)
9. Faruq Setiawan ST (anggota)
10. Siti Tsuaibah Sos (anggota)
11. Guruh Saputro SE (anggota)
12. Hj Siti Chustjah Sag (Anggota)
13. Siti Margo Lestari BA (Anggota)
14. H Ibnu Malik (anggota)

Exsekutif :

1. Drs. Sigit Purwanto MM (asisten 3 Sekretariat daerah)
2. Ir Supardiono MT (Kepala DPUPKP)
3. Drs. Teguh Suryanto (Kepala Dinas Sosial)
4. Dra. Gema Arsti wahyudi MM (BAPEDA)
5. Wahyuningsih SHI (BAPEDA)
6. Nur Sari Sugiastuti AKS (BAPEDA)
7. Muhammad Muh Aris Kusharyanto SSTP (DPUPKP)
8. Sudiono ST (DPUPKP)
9. Edi Purnomo ST (DPUPKP)
10. Rinawati Heri Prastuti SE (Dinas Sosial)
11. Aris Suprihartini Sos (Dinas Sosial)
12. Muhamad Fahmi Hidayat SH (Bagian hukum Setda)
13. Agung Priyono AMD (Bagian hukum Setda)

Memutuskan, menetapkan

Kesatu, membahas Rancangan Pengaturan Daerah kabupaten Temanggung tentang penanggulangan kemiskinan. Rancangan Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman sebagaimana hasil pembahasan terlampir.

Kedua, menyampaikan rancangan pengaturan daerah sebagaimana dimaksud ditum kesatu keputusan ini kepada rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung untuk persetujuannya ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah.

Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Temanggung pada tanggal 24 april 2019 DPRD Kabupaten Temanggung Pansus 1

Ketua : Badrun Mustofa

Sekretaris : Elynawati Spd keduanya ditanda tangani

Salinan keputusan ini disampaikan

kepada satu, Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
yang kedua, Yth. Anggota Pansus

Demikian laporan panitia khusus 1 dan kami ucapkan terima kasih atas bantuan serta seluruh anggota pansus dan seluruh anggota bapak-bapak dari OPD serta tim Perumus mudah-mudahan keputusan daerah ini memberi manfaat untuk kita dan masyarakat Temanggung.

Amin segala kekurangan mohon maaf

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pimpinan rapat :

Terima kasih pak Badrun juru bicara Panitia Khusus 1,

Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran Bupati Temanggung telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2018 kepada DPRD Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 4 April 2019.

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2018 dimaksud, sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Temanggung melalui Panitia Khusus telah melaksanakan pembahasannya dan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan daerah, Peraturan Kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah, maka dalam rapat paripurna hari ini akan kita ikuti penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2018.

Untuk keperluan tersebut kami persilahkan kepada juru bicara Pansus 2 untuk menyampaikan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung, kami persilahkan.

LAPORAN PANSUS 2 DPRD OLEH DRS. MUH SAYID.

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yang saya hormati Saudara Bupati Temanggung.

Yang saya hormati Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili.

Yang saya hormati. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah, Sdr. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Yang saya hormati Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah. para Direktur BUMD, Saudara Ketua dan Sekretaris KPU dan Saudara ketua dan Sekretaris Bawaslu.

Yang saya hormati Saudara-saudara para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan para Camat se Kabupaten Temanggung

Yang saya hormati Kawan-kawan para anggota Dewan, rekan-rekan Pers, LSM, Para Pemerhati Dewan dan Hadzirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Sebagai insan Pancasila yang bertakwa kepada Allah SWT Tuhan YME marilah senantiasa bkita panjatkan puji dan syukur ke hadiratnya yang telah melimpahkan Rahmad Taufiq dan Hidayahnya sehingga memungkinkan kita melaksanakan agenda konstitusional Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat Walafiat serta damai dan sejahtera. Selanjutnya ijinilah saya berbicara dari mimbar yang terhormat ini menjalankan dua fungsi yang pertama sebagai pelapor Panitia khusus 2 menyampaikan laporan tentang pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Pemerintahan Tahun 2018, kemudian fungsi yang ke 2 bertindak untuk dan atas nama DPRD menyampaikan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung TA 2018 , jadi mohon maaf mungkin menyita waktu agak panjang.

Saudara Ketua dan Rapat Sewan yang terhormat.

I. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Bupati diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

Secara garis besar laporan dimaksud menyangkut semua urusan penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang terangkum dalam 3 (tiga) kategori penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
3. Pelaksanaan tugas umum Pemerintahan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Jika tahun pertama pelaksanaan RPJMD dipandang sebagai tahap inisiasi dan instalasi visi, misi dan program kerja Bupati terpilih dan tahun kedua dipandang sebagai tahap implementasi dan realisasi visi, misi maka tahun terakhir bisa dipandang sebagai tahap finalisasi dari visi, misi, dan program kerja sehingga seharusnya arah kebijakan yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah secara jelas menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

RPJMD dijabarkan dalam program kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dengan target dan sasaran program dan kegiatannya. Target dan sasaran RKPD secara akumulatif dan agresif merupakan target dan sasaran RPJMD. Hubungan antara presisi dan konsistensi arah kebijakan yang ditempuh dengan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD inilah yang menjadi materi pembahasan dan penilaian DPRD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah laporan yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Tujuan dari penyampaian laporan ini adalah untuk mendapatkan keputusan dari DPRD yang berupa rekomendasi catatan-catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditahun-tahun yang akan datang.

Arah isi rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD berisi upaya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan rencana pembangunan daerah, tata kerja organisasi perangkat daerah, koordinasi sektoral dan koordinasi kewilayahan.

Rekomendasi yang berupa kegiatan dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berikutnya. Sedangkan rekomendasi yang berupa pemberian penghargaan atau teguran disampaikan secara spesifik, proporsional dan sesuai dengan lingkup

kewenangan DPRD yang dilandasi oleh *goodwill* untuk perbaikan ditahun-tahun yang akan datang. Isi rekomendasi menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar pembahasan yang digunakan oleh DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

III. MATERI PEMBAHASAAN

Materi pembahasan adalah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018.

IV. METODE PENILAIAN

Dalam melakukan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, Metode yang digunakan adalah analisis terhadap :

1. Kualitas penyajian dan penyusunan LKPJ.
2. Instrumen daftar simak penilaian yang meliputi rasio-rasio keuangan dan rasio-rasio kinerja.
3. Analisis selisih antara rencana dan realisasi yang merupakan analisis prestasi pencapaian target kinerja masing-masing urusan pemerintahan.

Sedangkan yang menjadi bahan kajian adalah :

1. Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah.
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
9. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
11. Regulasi yang mengatur Pemerintahan Daerah.
12. Resume catatan Komisi-komisi DPRD tahun 2018.

V. METODE PEMBAHASAN

Dalam melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2018, metode pembahsan yang digunakan adalah dengan melakukan Rapat Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kunjungan lapangan serta mencari pembanding didaerah lain.

Rapat Kerja dengan OPD dimaksudkan sebagai forum untuk diskripsi, verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi terhadap seluruh urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab masing-masing OPD. Dengan sistem partisipatoris seperti ini, dimana semua yang hadir menjadi narasumber, maka diharapkan dapat terungkap laporan kinerja masing-masing OPD yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mengungkapkan secara jujur permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya serta terbebas dari salah saji material. Sedangkan kunjungan lapangan dimaksudkan untuk menginformasi lebih lanjut data dan informasi yang disampaikan oleh OPD.

Kunjungan lapangan dan membandingkan didaerah lain dalam rangka untuk mencari sejauh mana implementasi program-program dan kegiatan dilakukan dilapangan serta mencari ruang-ruang obyek pembahasan yang bisa dilakukan di Kabupaten Temanggung.

Dengan metode pembahasan yang demikian maka rekomendasi dari DPRD yang berupa catatan-catatan strategis dan solusi pemecahan masalah yang disampaikan akan bersifat obyektif, konstruktif dan implementatif untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditahun-tahun yang akan datang.

VI. PENUTUP

Terhadap materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 beberapa isu strategis yang menjadi topik utama diskusi Panitia Khusus 1 adalah menyangkut isu pengetasan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Ketiga isu ini masih akan menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus merupakan tantangan pembangunan daerah ditahun-tahun yang akan datang.

Angka kemiskinan diKabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebesar 9,87% atau sebanyak 75.571 jiwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dari 765.659 jiwa penduduk. Angka ini akan semakin membesar jika ditambah dengan penduduk yang sedikit berada diatas garis kemiskinan, atau mereka yang tergolong penduduk rentan miskin. Karena guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin. Oleh karenanya program-program pengentasan kemiskinan pertama-tama harus didukung dengan data-data yang berbicara tentang siapa yang miskin, dimana mereka dan mengapa mereka miskin. Selanjutnya didukung dengan program-program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antar sektor oleh semua OPD terkait dan fokus pada satu tujuan pengentasan kemiskinan serta didukung dengan politik anggaran yang memadai dan konsisten. Dengan demikian maka diharapkan program-program pengentasan kemiskinan akan tepat sasaran, efektif dan berhasil guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebesar 3,24% sebenarnya relatif rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,51%. Namun jika dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung yang pada tahun 2018 sebesar 73,96% maka angka tersebut mengisyaratkan masih perlunya peningkatan penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif.

Panitia Khusus mengkaitkan upaya peningkatan kesempatan kerja ini bagi penduduk usia produktif ini dengan program penyediaan fasilitas infrastruktur di kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan tujuan untuk lebih banyak menarik masuknya investasi ke daerah khususnya bagi investasi sekunder yang bersifat *top down*. Hal ini mengingat dari 586 hektar luas lahan yang disediakan untuk KPI dan seluas 96 hektar KLHS baru 30% yang dimanfaatkan. Oleh karena itu kebijakan fasilitasi KPI dan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi para calon investor perlu dilakukan yang pada gilirannya akan memberikan *multiplier effect* berupa peningkatan kesempatan kerja bagi angkatan kerja kita.

Secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang tidak merata. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya banyak kesenjangan diwilayah Kabupaten Temanggung. Kesenjangan terjadi karena banyaknya jumlah pengangguran yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan oleh karena tidak memiliki pendapatan maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga

menjadi orang miskin. Pengangguran dan kemiskinan inilah yang menyebabkan kesenjangan dengan mereka yang berkerja dan memiliki pendapatan.

Keadaan ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi sesamanya dan merupakan tantangan pembangunan yang harus diselesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Dampak dari kesenjangan selain masalah ekonomi juga akan berdampak kepada masalah sosial, potensi gangguan keamanan, politik dan lain-lain. Kesenjangan dapat diatasi bila dikendalikan dan ditata agar jurang perbedaan tidak semakin lebar. Kesenjangan dapat diatasi dengan penyadaran pihak yang kaya untuk membayar pajak yang lebih besar sesuai aturan dan memberikan subsidi serta bantuan kepada yang miskin sesuai kemampuan. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Selanjutnya kami bacakan Keputusan Panitia khusus.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS 2

Selanjutnya kami bacakan rekomendasi Panitia Khusus 2, rekomendasi kita sampaikan per organisasi perangkat Daerah yang tentunya mencakup urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dari OPD masing-masing.

1. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Temuan / Permasalahan:

1. Kekurangan guru pada satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) sebagai akibat distribusi tenaga pendidik yang tidak merata
2. Belum ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal khususnya dalam hal ini adalah Kementrian Agama terkait Regruping sekolah. Sehingga disuatu desa sudah dilakukan regruping karena jumlah muridnya dan standart di sekolah tersebut tidak memenuhi tapi de disa yang sama muncul sekolah baru yang jenjang yang sama ini sama saja tidak berarti regruping yang dilaksanakan.
3. Bantuan kesejahteraan GTT/PTT belum memenuhi standar UMK
4. Masih banyak ditemukan asset eks SD yang diregrouping tidak terurus

Rekomendasi:

1. Kebijakan regrouping agar diintensifkan dan penataan distribusi tenaga pendidik

2. Kebijakan regrouping agar diberengi dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama sehingga daerah/desa yang sudah dilaksanakan regrouping tidak muncul sekolah baru yang sejenjang.
3. Agar bantuan kesejahteraan bagi GTT/PTT dinaikan secara bertahap sehingga minimal bisa setara dengan UMK.
4. Perlu dilakukan inventarisasi asset SD (eks regrouping) untuk diserahkan menjadi asset desa.

2. DINAS KESEHATAN

Temuan/ Permasalahan:

1. Masih terdapat 33.246 rumah tangga yang tidak memiliki jamban
2. Masih terdapat warga miskin yang belum tercover BPJS kesehatan.
3. Pelayanan BPJS masih dirasakan menyulitkan pasien yang antara lain yang paling dirasa menyulitkan adalah dirawat inap di rumah sakit 4 hari sembuh tidak sembuh harus pulang dulu baru kemudian berangkat lagi ke rumah sakit ini yang sangat menyusahakan bagi pasien karena ketentuan tentang peraturan ini berasal dari pusat maka perlu usul perubahan peraturan terkait dengan pelayanan BPJS kesehatan yang harus diakui masih banyak menimbulkan masalah di masyarakat.
4. Penderita HIV/AIDS makin meningkat

Rekomendasi:

1. Dalam rangka mencapai 100% ODF maka perlu ditingkatkan program jambanisasi baik melalui APBD, Dana Perimbangan, APBDes maupun Dana CSR.
2. Agar cadangan PBI dialokasikan untuk meng-cover keluarga miskin yang belum mendapatkan BPJS kesehatan.
3. Perlu usul perubahan peraturan terkait pelayanan kesehatan BPJS
4. Perlu peningkatan program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS

3. INSPEKTORAT

Temuan/Permasalahan:

1. Beban pekerjaan inspektorat tidak seimbang dengan jumlah auditor (kebutuhan minimal 30 auditor, ideal 54 auditor, sekarang ini baru tersedia 14 auditor). Sehingga sangat mendesak untuk dilakukan penambahan tenaga auditor.

Rekomendasi:

1. Sangat mendesak untuk dilakukan penambahan tenaga auditor, dan rekomendasi ini sudah kita sampaikan berkali-kali tiap tahun tapi tidak pernah ada tanggapan atau tindak lanjut yang memadai untuk itu harapan kita kali ini kita mohon tidak hanya berbalas pantun pak Bupati, antara Dewan dengan Bupati tapi mohon ini menjadi perhatian yang sungguh-sungguh ketercukupan Inspektorat sekaligus tunjukkan Goodwill dari pemerintah daerah untuk menciptakan clean and good governance.

4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Temuan/ Permasalahan:

1. Perencanaan pembangunan desa belum secara optimal melibatkan partisipasi masyarakat, ini kita tangkap di beberapa desa yang namanya Musrenbangdes itu hanya sebatas formalitas saja Musdus dan lain-lain itu tidak pernah diperhatikan karena kepala desa bersama dengan elit desa sudah menyiapkan Musrenbang tersendiri jadi Musrenbang hanya sekedar formalitas peserta diminta untuk menyetujui yang sudah di rencanakan tentunya ini tidak baik untuk itu rekomendasi kami :
2. Dana desa belum optimal mengalokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Transparansi pengelolaan kegiatan APBDes masih sering menimbulkan prasangka dari masyarakat terutama pada kegiatan infrastruktur/ fisik.

Rekomendasi:

1. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa
2. Perlu dibuat regulasi yang mengatur Batasan minimal alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Supaya tidak semua terserap untuk kegiatan infrastruktur yang sifatnya fisik
3. Transparansi pengelolaan kegiatan perlu ditingkatkan dengan memberikan informasi pelaksanaan kegiatan secara rinci dan terbuka kepada masyarakat (jika perlu RAB dipasang di lokasi kegiatan supaya tidak menimbulkan praduga di masyarakat, praduga muncul bukan karena ada penyelewengan tapi lebih sering karena masyarakat tidak mengetahui informasi yang sesungguhnya).

5. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Temuan/ Permasalahan:

1. Masih lemahnya posisi tawar petani dan lemahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian, inovasi dan teknologi pertanian untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani.
2. Kartu Tani terbukti menyulitkan masyarakat petani, mohon maaf pak Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan penjelasan yang disampaikan kemarin sangat bisa kami pahami tapi kenyataan di lapangan petani masih sangat sulit untuk mendapatkan pupuk dengan kuota dengan jumlah sesuai kebutuhan mereka ini harus kita akui dan kemudian petani harus setor dulu ke Bank yang namanya subsidi kok malah harus setor dulu ke Bank ini saya kira kebijakan yang tidak tepat, jadi dalam pandangan Pansus Kartu tani ini menyulitkan masyarakat petani kita. Karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah Propinsi.
3. Petani mengalami kesulitan dalam pemasaran produksi pertanian dan pengolahan pasca panen.

Rekomendasi:

1. Perlu pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani seperti Kelompok Tani dan Gapoktan dengan tujuan meningkatkan daya tawar petani, meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan teknologi pertanian.
 2. Mengusulkan Kartu Tani untuk dicabut diganti dengan kebijakan baru yang mempermudah petani.
 3. Perlunya program penanganan pasca panen.
6. DPUPKP

Temuan/ Permasalahan:

1. Terdapat 60% jaringan irigasi tersier yang dalam kondisi rusak yang ini tidak mungkin penanganannya diserahkan menjadi tanggung jawab desa. Melalui APBDes semata karena dibutuhkan anggaran yang cukup
2. Banyak jalan kabupaten dan jembatan yang rusak sedangkan kemampuan anggaran daerah terbatas.
3. Pembangunan jalan antara desa terkendala oleh mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Rekomendasi:

1. Diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah untuk merehabilitasi pembangunan jaringan irigasi tersier.
2. Pemeliharaan jalan dan jembatan agar berdasarkan skala prioritas.

3. Pemerintah Daerah memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan antara desa.

7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Temuan/ Permasalahan :

1. Keberadaan TPA Kranggan sudah tidak mampu menampung volume sampah di Kabupaten Temanggung, yang tiap hari 65 ton.
2. Kondisi lahan kritis sudah mengkhawatirkan yang berakibat makin berkurangnya sumber mata air. Kita lihat kemarin bahkan di musim hujan masih curahannya tinggi beberapa desa masih saja kekurangan untuk air kebutuhan rumah tangga mereka.

Rekomendasi:

1. a. Perlu pembangunan TPA baru di wilayah Temanggung bagian utara. Jadi yang kemarin sempat tertunda karena kesulitan pengadaan tanah mohon untuk dilanjutkan kembali di tahun 2020 yang akan datang.
b. Perlu peningkatan peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui TPS3R, Depo Transfer dan Bank Sampah.
2. Konservasi lahan kritis perlu ditingkatkan dengan melibatkan Pemerintah Desa, pihak swasta dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat peduli lingkungan.

8. DPMPTSP

Temuan/ Permasalahan:

1. Fasilitas Kawasan peruntukan industri masih minim sehingga menghambat laju investasi di daerah.
2. Investasi sector primer UMKM belum tercatat sebagai investasi di Kabupaten Temanggung.

Rekomendasi:

1. Agar pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana di Kawasan peruntukan industri seperti pembebasan tanah untuk akses jalan masuk.
2. Agar ada koordinasi antara OPD yang membidangi untuk mencatat investasi primer ini menjadi investasi di daerah (seperti; KUR, Bumdes, eks PNPM, dan KEK yang ada di Kecamatan-kecamatan itu dan yang lain-lain).

9. DISPERINDAGKOP UKM

Temuan/ Permasalahan:

1. Profesionalisme pengelolaan koperasi masih banyak yang belum sesuai dengan standar dan masih banyak praktik koperasi simpan pinjam (KSP) yang tidak

sesuai dengan azas-azas perkoperasian. Jadi banyak koperasi ini menjadi perusahaan simpan pinjam yang dalam prakteknya seperti renternir ini pak Bupati, penerapkan bunga yang sangat tinggi pada debeturnya yang kemudian banyak menimbulkan masalah, yang terakhir mendengar kabar BMT di Selopampang itu terlilit macet sampai milyaran rupiah dan salah satu debeturnya adalah Caleg, jadi mungkin kemarin pinjam untuk bagi-bagi amplop itu, nyabrang di BMT ya. Yang itu memang harus kita akui terjadi kemarin seperti itu hujan amplop di Kabupaten Temanggung, inilah negeri amplop.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi koperasi terutama koperasi simpan pinjam (KSP) agar koperasi-koperasi yang ada dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
2. Perlu di buat regulasi yang mengatur usaha koperasi simpan pinjam untuk melindungi masyarakat dari praktek renternir. Ini memprihatinkan sekali, jadi kalau kemarin penjelasan dari Disperindagkop baru bisa menjangkau yang lembaga-lembaga resmi pak, yang lebih membahayakan itu praktek renternir perorangan ini pak yang istilahnya nglimolasi, pinjam satu juta kembali satu juta lima ratus rupiah, pinjam 100 juta kembalinya 150 juta dengan agunan tertentu kemudian ketika tidak bisa nyarutang pada jatuh tempo yang ditentukan agunannya ditarik tanpa penghitungan ulang di kalkulasi nilainya sekian yang sekian di kembalikan tapi semuanya ditarik, praktek seperti ini menimbulkan kemiskinan baru pak Bupati di masyarakat jadi hal-hal seperti ini saya kira harus ada pengawasan pemerintah daerah agama juga melarang praktek renternir lintah darat seperti ini yang terbukti menghisap darah masyarakat kita harus kita berantas seperti ini.

10. BAPPEDA

Temuan/ Permasalahan :

Pelaksanaan program RPJMD terjadi kegiatan-kegiatan yang sama di beberapa OPD

Rekomendasi:

Perlu dilakukan sinkronisasi antara OPD agar tidak terlalu banyak kegiatan sejenis dalam satu program.

11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Temuan/ Permasalahan:

1. Belum semua desa/ wilayah terjangkau layanan internet

Rekomendasi:

1. Perlu percepatan program layanan internet untuk menjangkau semua desa/ wilayah di Kabupaten Temanggung. Karena internet ini sekarang sepertinya sudah menjadi kebutuhan primer, tidak makan tidak apa-apa tapi asal bisa WA nan bisa Facebook an bisa twiteran itu, bahkan anggota dewan sendiri saat rapat atau sidang lebih asik memperlmainkan HP nya dari pada focus pada agenda rapat atau agenda persidangan, jadi khusus untuk internet ini harapan kita bisa menjangkau seluruh desa dan seluruh wilayah terutama dalam rangka mendukung UNBK pak Bupati Ujian Nasional Berbasis Komputer di Temanggung ini ada 24 SMP Negeri yang terjangkau baru 14 SMP jadi yang sisanya yang perlu dibantu ketika pelaksanaan UNBK mereka tidak mengalami kendala-kendala.

12. BPPKAD

Temuan/ Permasalahan :

1. Masih banyak obyek pajak parkir yang belum tergarap menjadi objek sumber pendapatan daerah.
2. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Kepada Desa.

Rekomendasi :

1. Perlu pendataan objek pajak parkir agar menjadi sumber pendapatan daerah sesuai potensi yang ada. Dan kemarin sudah disanggupi oleh BPPKAD
2. Agar dilakukan koordinasi antara BPPKAD dengan OPD terkait agar pelaksanaan kegiatan infrastruktur dilakukan pada awal atau setidaknya pertengahan tahun anggaran berjalan. Bukan pada akhir tahun anggaran khususnya untuk proyek-proyek fisik yang berkaitan dengan air saluran irigasi talud jembatan dan sebagainya ketika musim hujan sudah sangat tinggi curahannya pembangunan dilaksanakan tentunya ini sagat tidak efisien untuk itu kegiatan-kegiatan seperti ini mohon dilaksanakan di awal atau pertengahan tahun anggaran.

13. DINAS SOSIAL

Temuan/ Permasalahan:

1. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sering menimbulkan permasalahan / konflik di masyarakat akibat validitas data yang diragukan.

Rekomendasi:

1. Agar dilakukan validasi data kemiskinan secara berkala.

14. DINAS TENAGA KERJA

Temuan/ Permasalahan :

Masih ditemukan beberapa perusahaan yang membayarkan upah pekerjaanya di bawah UMK.

Rekomendasi:

Agar dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang belum membayarkan upah pekerjaanya sesuai UMK.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, sekali lagi Pansusu dan juga DPRD sangat berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi catatan-catatan strategis yang kami sampaikan betul – betul menjadi perhatian dari saudara Bupati untuk ditindaklanjuti supaya kita tidak terjebak dalam berbalas pantun menjadi perhatian kami akan kita tindak lanjuti dan sebagainya tapi dalam pelaksanaannya seperti tahun-tahun yang lalu kurang mendapatkan perhatian yang semestinya, saya kira kita sangat berharap demi penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan yang lebih baik apa yang menjadi rekomendasi DPRD untuk di tindak lanjuti, demikian kami sampaikan tentu saja banyak kekurangan kesalahan dalam saya berbicara mewakili Pansus dan sebagai juru bicara DPRD tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada manfaat atau kelebihannya semata-mata itu adalah milik Allah SWT, terima kasih Wabialahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Pimpinan rapat :

Terima kasih pak Sayid

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung tentang hasil kerjanya.

Selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib, setelah Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil kerjanya, kita perlu mendengarkan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman hasil pembahasan Panitia Khusus 1 DPRD.

Mengawali Pendapat Fraksi kami persilahkan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

PENDAPAT FRAKSI PDI-PERJUANGAN OLEH H. AGUNG PRIYO WIDODO

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati Temanggung

Yth. Forum komunikasai Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, Asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yth. Rekan – rekan anggota DPR

Yth. Para camat se Kabupaten Temanggung

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT / Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah mendengar laporan dari pelapor Pansus 1 yang membahas Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Pedoman Penyertaan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman Maka kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui hasil keputusan Pansus 1 Nomor : 7/ PANSUS I/ IV / 2019 , tanggal 24 April 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung pada Paripurna hari ini. Tanpa mengurangi arti persetujuan kami ada hal yang kami sampaikan :

Terkait kemiskinan,

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah hampir di seluruh daerah, hal ini menjadi salah satu tantangan besar. Untuk itu perlu adanya formula kebijakan yang baik untuk menyelesaikan penurunan kemiskinan salah satunya tidak hanya menjadi program dinas sosial saja, namun seharusnya menjadi program prioritas seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), sehingga percepatan penurunan kemiskinan dapat segera terselesaikan.

Demikian pendapat Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Temanggung, 25 April 2019

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Ketua Dra. Titik Winarti, ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Terima kasih pak Agung, selanjutnya kami persilahkan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OLEH NIKEN RATNAWATI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang terhormat;

Kepada Yang terhormat Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Kepada Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung yang kami hormati.

Serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung terhadap keputusan pansus 1 DPRD kabupaten Temanggung nomor 7 tahun 2019 tentang rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang penanggulangan kemiskinan dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna dengan agenda membahas Hasil Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 7 tanggal 24 April tahun 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta hasil Keputusan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 8 tanggal 24 April tahun 2019 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan dan membela rakyat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi, dan melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus 1 dan Pansus 2 yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan pembahasan Raperda di atas, semoga atas jerih payahnya tersebut mendapatkan pahala disisi Allah SWT.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Setelah mencermati laporan dari pelapor Panitia Khusus 1 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pedoman Penyerahan Prasarana, Saran, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesaat tadi dan mendengarkan laporan dari anggota FPKB yang duduk dalam Panitia khusus, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim FPKB menyatakan dapat menerima Hasil Pembahasan Pansus 1 dengan memberikan catatan dan saran sebagai berikut :

1. Terkait Penanggulangan Kemiskinan memang harus menjadi prioritas dan menjadi perhatian kita bersama, oleh karena itu FPKB sangat mendukung adanya Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan ini dan berharap Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi program dan terobosan-terobosan baru dan mampu menjaga kondusifitas sinergi dengan seluruh unsur yang ikut berperan serta melaksanakan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan implementasi dari kebijakan ini yang merupakan langkah kongkrit Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam raperda ini.

2. Terkait Raperda Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman, FPKB berharap setelah ditetapkannya raperda ini menjadi peraturan Daerah, Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi segera melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan secara tegas dengan melakukan langkah-langkah setrategis dan kongkrit, sehingga PSU yang sampai saat ini belum jelas status pengelolaannya dapat segera diperjelas dan dipastikan.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, tentunya FPKB berharap agar Pemerintah Daerah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian penyampaian pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 25 April 2019

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung ketua Mahzum sekretaris Umi Tsuwaibah masing-masing ditandatangani.

Pimpinan Rapat :

Terima kasih Bu Niken, selanjutnya kami persilahkan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Sejahtera.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR SEJAHTERA OLEH DWI LINDAWATI, SH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati Ketua Rapat dan para Wakil Ketua DPRD

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati Para anggota FKPD atau yang mewakili

Yang kami hormati Saudara Sekda, para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Para Camat, dan Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Yang kami hormati Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan – rakan anggota DPRD

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmad dan hidayah-

Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan yang merintang

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar Sejahtera terhadap keputusan Pansus I DPRD Kabupaten Temanggung, setelah mendengar laporan dari para pelapor Pansus I sesaat tadi, dan mencermati hasil pembahasan Raperda, serta mendengar laporan dari anggota Fraksi Partai Golkar Sejahtera yang ditugaskan pada Pansus I maka pada kesempatan ini Fraksi Partai Golkar Sejahtera memandang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai sumbang saran atau masukan pada tahap pelaksanaan yang akan datang, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Penanggulangan Kemiskinan adalah hal primer yang seharusnya menjadi fokus utama pembangunan Daerah. Oleh karena itu FPGS berpendapat, bahwa persoalan ini seharusnya tidak hanya menjadi program Dinas Sosial, namun menjadi program prioritas seluruh OPD sehingga percepatan penurunan kemiskinan dapat segera terwujud.
- b. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengurangi Persoalan Kemiskinan dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yang jika mengandalkan kemampuan Daerah Kabupaten Temanggung tentunya tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, FPGS berpendapat bahwa Pemerintah Daerah perlu melibatkan pihak lain semisal perusahaan melalui CSR agar penurunan kemiskinan di kabupaten Temanggung dapat dipercepat.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Fraksi Partai Golkar Sejahtera dengan seraya memohon Rindho dari Allah SWT, serta mengucap "Bismillahirrahmanirrahim" menyatakan dapat menerima dan menyetujui keputusan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung No.7 / PANSUS / IV /2019, tanggal 24 April 2019 tentang Raperda Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Kabupaten Temanggung tentang pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman, dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna dewan hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar Sejahtera, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirulkholaam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 25 April 2019

Fraksi Partai Golkar Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung, ketu Ishadi, sekretaris Slamet, SE. masing-masing ditrandatangani.

Pimpinan rapat :

Terima ksh bu Linda, kami persilahkan juru bicara Fraksi PAN-PD.

PENDAPAT FRAKSI PAN-PD OLEH FAROUK SETIAWAN, ST
--

Assalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pendapat Fraksi Pan PD Terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan dan terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman

Yang kami hormati Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang kami hormati Saudara Sekda dan para Asisten Sekda

Yang kami hormati Sdr Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanaggung

Yang kami hormati Para Camat se Kab. Temanggung

Yang kami hormati Ketua KPUD Kab. Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran sekwan serta rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dewan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunah-sunahnya dan kita berharap semoga kita termasuk di dalamnya. Amin

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PAN-PD.

Ucapan terimakasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang duduk dalam Panitia Khusus 1 dan Eksekutif yang telah melaksanakan pembahasan dengan baik dan semoga apa yang telah di berikan, dicatat sebagai amal ibadah dan diterima oleh Allah SWT. Amin.

Terhadap dua Raperda dimaksud Fraksi PAN-PD akan memberikan catatan, pendapat dan saran-saran sebagai berikut:

1. Verifikasi validasi data kemiskinan tiap semester memerlukan program pendampingan penanganan kemiskinan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Sehingga program penanganan kemiskinan dapat sinergis dengan program penanganan kemiskinan secara nasional.
2. Perlunya informasi kepada Masyarakat mengenai bonafiditas pengembang di Kabupaten Temanggung.
3. Masih banyak pengembang yang beretika kurang baik, mereka meninggalkan pekerjaan yang belum selesai selain itu sering kali terjadi pengembang menjual lahan PSU kepada oknum lain, untuk itu diperlukan sanksi yang tegas kepada pengembang yang seperti ini. Mohon tanggapannya!
4. Masih sering terjadi perselisihan antara warga perumahan dengan penduduk asli berkaitan dengan pembangunan PSU terutama jaringan saluran air limbah, saluran pembuangan air hujan & tempat pembuangan sampah. Mohon tanggapannya.
5. Penyediaan sarana pemakaman sering menjadi masalah yang serius baik di internal warga perumahan yang tidak memiliki sarana pemakaman dgn warga sekitar yg memiliki sarana makam namun hanya untuk warganya & tidak disediakan untuk umum. Mohon tanggapannya

Sidang dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Setelah mendengar laporan dari pelapor Panitia Khusus sesaat tadi dan masukan dari anggota fraksi kami yang duduk di pansus 1 maka kami Fraksi PAN-PD dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim, dapat menerima dan menyetujui Keputusan Pansus 1 Nomor: 7/ PANSUS 1/ IV / 2019 Tanggal 24 April 2019.

Demikian pendapat Fraksi PAN-PD ini kami sampaikan dengan harapan semoga memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Temanggung khususnya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin.

Bilahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Temanggung, 25 April 2019

Fraksi PAN-PD DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua Badrun Mustofa, S.Pd, sekretaris Arif Rosidi, ditandatangani.

Pimpian rapat :

Terima kasih pak Farouk, selanjutnya kami persilahkan Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

<p style="text-align: center;">PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN OLEH GURUH SAPUTRO. SE</p>
--

Assalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Tahun Anggaran 2019

Yang terhormat Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Saudara Wakil Bupati Temanggung

Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) atau yang mewakilinya Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Dinas , Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se kabupaten Temanggung

Para Direktur BUMD,

Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD

Insan Pers, Pemerhati Dewan,

Rekan-rekan Anggota DPRD dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pansus DPRD Kabupaten Temanggung yang telah menyelesaikan pembahasan terhadap dua rancangan peraturan daerah sesuai dengan waktu yang kita sepakati.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dalam mensikapi hasil pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung tentang Raperda Penanggulangan kemiskinan dan Raperda tentang Pedoman

Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Permukiman ada beberapa hal yang akan kami sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

FPPP berharap sangat apresiatif terhadap anggota pansus dalam membahas raperda tentang kemiskinan, karena keberhasilan sebuah pembangunan atau pemerintah daerah dikatakan berhasil manakala tingkat kemiskinan berdasarkan data statistik mengalami penurunan yang signifikan. Dalam hal ini FPPP berharap agar perda tentang penanggulangan kemiskinan benar benar menjadi acuan bersama dalam mengatasi problematika kemiskinan sehingga angka kemiskinan bisa turun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam raperda ini FPPP ada beberapa masukan yaitu :

- Masukan data awal tentang warga kemiskinan harus memperhatikan kondisi riil dimasyarakat, dan verifikasi juga validasi basis data kemiskinan harus mengacu dan melibatkan warga dimulai dari tingkat musyawarah dusun, musyawarah desa sampai rekapitulasi ditingkat kecamatan, dalam hal ini sangat mungkin data yang dihasilkan tidak bersifat stagnan tetapi akan mengalami dinamisasi tiap tahun, mohon agar hal tersebut bisa diantisipasi sejak awal.
- Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan perlu membuat rencana program sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap warga miskin, tetapi FPPP berharap agar program yang dilaksanakan tidak sekedar memberikan bantuan ibarat kata seperti pemadam api dalam kebakaran, tetapi program lebih banyak kepada pola pemberdayaan, pada masyarakat agar dipersiapkan lewat konsep yang lebih bagus ke depannya.

2. Raperda Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Dalam hal ini FPPP memberikan beberapa penekan diantaranya adalah sebagai berikut.

- Dalam pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum ketentuan dan syarat yang berlaku minimal 40% dari total luas tanah sesuai dengan peruntukannya harus benar-benar dijalankan oleh pihak pengembang dan dalam hal ini pemerintah daerah juga harus tegas dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini .

- FPPP juga berharap agar Perda ini bisa bermanfaat dalam rangka melindungi konsumen, jangan sampai ada masyarakat pemakai jasa yang dirugikan oleh pihak pengembang karena permasalahan legalitas perumahan. Atau sebagainya.

Sidang Dewan yang terhormat.

Setelah mendengar laporan dari pelapor Pansus dan mendengarkan laporan dari anggota kami yang duduk di Pansus DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat :

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh SWT, dan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, FPPP bisa menerima dan setuju atas Keputusan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung No.7 Pansus I/IV/2019 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan mohon kepada rapat paripurna DPRD terdekat untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Temanggung.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua Slamet Eko Wantoro, sekretaris Guruh Saputro keduanya ditandatangani.

Bilahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan rapat :

Terima kasih pak Guruh, selanjutnya ami persilahkan juru bicara fraksi Gerindra.

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA OLEH DANIEL INDRA HARTOKO. SE

Assalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sugeng siang salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua DPRD

Yang saya hormati pak. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota DPRD, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna ini dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Raperda :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan prioritas kebijakan pembangunan. Semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan semakin banyak jumlah penduduk dengan kategori sejahtera maka semakin berhasil penyelenggaraan suatu pemerintahan. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan ini Fraksi GERINDRA berkeyakinan Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Fraksi GERINDRA juga berharap semoga dengan disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan Dan Pemukiman, dapat memberikan kepastian hukum akan kewajiban dari pengembang untuk kebutuhan dari konsumen disamping harus memperhatikan sinkronisasi atau keseuaian dengan perda lain yang terkait karena salah satu indikasi kesejahteraan masyarakat diukur dari layak tidaknya perumahan atau hunian di lingkungan masyarakat tersebut.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Fraksi GERINDRA dapat menyetujui menerima Keputusan Panitia Khusus 1, Nomor 7/PANSUS 1/IV/2019 tanggal 24 April 2019, selanjutnya Fraksi GERINDRA Mengusulkan Kepada Rapat Paripurna ini untuk mendapat persetujuan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi GERINDRA ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Saya Akhiri, Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 25 April 2019

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung

Daniel Indra Hartoko, Indah Cahyani masing-masing ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Terima kasih pak Daniel, selanjutnya kami persilahkan juru bicara fraksi Hanura.

<p>PENDAPAT FRAKSI HANURA</p>

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat Pimpinan rapat, beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang Terhormat Sdr. Bupati Temanggung

Yang saya hormati forum koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili

Yang saya hormati rekan rekan anggota Dewan

Yang saya hormati sekretaris daerah, dan para asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala lembaga teknis daerah, kepala bagian, Kepala Kantor dan segenap jajaran eksekutif

Yang saya hormati para direktur perusahaan daerah

Para pemerhati Dewan, rekan – rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Sebelumnya perkenankanlah kami mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan ini kita diberi kekuatan dan kesehatan dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhamad SAW yang sangat dinantikan syafaatnya di Yaumul khyamah.

Mengawali pendapat ini Fraksi kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya menyampaikan LKPJ. Teriring Doa dan harapan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya sehingga kita mampu menunaikan tugas dan kewajiban dalam upaya mewujudkan keadaan kabupaten Temanggung yang lebih baik untuk kita semua dan Masyarakat pada umumnya..

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai HANURA kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan Dan Pemukiman, dapat memberikan kepastian hukum akan kewajiban dari pengembang untuk kebutuhan dari konsumen disamping harus memperhatikan fungsi dan implementasi dari kebijakan ini yang merupakan langkah kongkrit Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam raperda ini.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi HANURA dapat menyetujui dan menerima Keputusan Panitia Khusus 1, Nomor7/PANSUS 1/IV/2019 tanggal 24 April 2019, selanjutnya Fraksi HANURA Mengusulkan Kepada Rapat Paripurna ini untuk mendapat persetujuannya.

Demikianlah Pendapat Fraksi HANURA, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati para hadirin, atas segala perhatian kami sampaikan terima kasih.

Wabialihi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh...

Temanggung, 25 April 2019

DPRD Kabupaten Temanggung Fraksi Hanura Ketua Isnarwandi, sekretaris Bambang Romanto, ST, masing-masing ditanda tangani.

Pimpinan rapat :

Terima kasih pak Is.. selanjutnya kami persilahkan juru bicara Fraksi Partai NasDem.

PENDAPAT FRAKSI NASDEM OLEH Hj. SITI KUSTIJAH. S.Ag.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Pendapat akhir fraksi partai Nasdem

Atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan Dan Pemukiman

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yang kami hormati Saudara Bupati.

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili.

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah.

Yang kami hormati Saudara-Saudara Kepala SKPD, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung.

Yang kami hormati Saudara-Saudara Direktur BUMD, Saudara Ketua KPU dan Saudara-Saudara Kepala Instansi Vertikal.

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan, Insan Pers, LSM, Para Pemerhati Dewan dan Hadzirin serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas limpahan taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas yaitu menyelenggarakan Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat dan damai serta sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Dewan Yth.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem ini, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Panitia Khusus yang telah menyelesaikan amanat yang diberikan oleh sidang Paripurna Dewan beberapa hari yang lalu dan Fraksi Partai NasDem telah mengikuti dengan seksama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh Panitia Khusus 1 dan melalui anggota Fraksi yang duduk dalam keanggotaan Panitia Khusus 1 tersebut.

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Paniti khusus 1 sesaat tadi, maka dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuk dari Allah SWT. dan diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirahiim, Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor : 7/PANSUS 1/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Dan selanjutnya kami mengusulkan agar Keputusan Panitia Khusus 1 tersebut dimintakan persetujuan dari Rapat Paripurna Dewan hari ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sidang Dewan Yth

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggung jawab kami dan untuk itu kami mohon maaf. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam

menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 25 April 2019

Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, ketua Drs. Muh Sayid, sekretaris Umi Fadhillah, masing-masing ditanda tangani.

Pimpinan rapat :

Terima kasih bu Kustijah

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tadi telah kita ikuti Pendapat Fraksi-fraksi DPRD terhadap hasil kerja Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 DPRD.

Berdasarkan Laporan Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 DPRD serta Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Merekomendasikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana Keputusan Panitia khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 8/Pansus 2/IV/2019 tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan DPRD.
3. Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Kami tanyakan, apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu 1 kali), Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a Peraturan Tata Tertib DPRD, kita perlu mendengarkan pendapat akhir Bupati Temanggung atas persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Namun sebelumnya akan dilakukan penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2018, selanjutnya guna keperluan Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung, kepada Saudara Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD kami persilahkan untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon untuk berdiri ----- stop.

**PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TERHADAP LKPJ BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018 OLEH KETUA DPRD
KEPADA BUPATI TEMANGGUNG**

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Bupati untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Kami persilahkan.

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG

Bismillahirrohmanirohim

Pendapat akhir bupati Temanggung Pada rapat paripurna DPRD Tentang Penyampain Pengantar raperda dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung tahun 2018 Temanggung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salamat pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua

- Yang terhormat Pemimpin beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah, beserta segenap jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Yang terhormat Para Direktur BUMD, Para perhati Dewan, LSM, dan teman-teman dari Kalangan pers, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kenikmatan dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus DPRD terhadap Raperda dan LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan melalui Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung :

1. Nomor : 7/Pansus 1/IV/2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Nomor: 8/Pansus.2/IV/2019 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan yang baik ini pula secara pribadi maupun atasnama Pemerintah Kabupaten Temanggung, saya mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung serta apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD atas pembahasan Raperda diatas dan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 serta menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat disetujui dan ditetapkan dengan alasan Pemerintah Daerah mempunyai pedoman atau Dasar Hukum dalam melakukan langkah-langkah strategis penanggulangan kemiskinan dengan harapan penerima manfaat yaitu penduduk miskin, keluarga miskin dan keluarga rentan miskin di Kabupaten

Temanggung semakin berkurang dan derajat kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat di setujui dan ditetapkan dengan alasan Pemerintah Daerah mempunyai pedoman atau Dasar Hukum dalam proses Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan kawasan Permukiman dengan harapan dapat terwujud kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni perumahan dan permukiman yang sehat dan teratur serta kawasan yang tertata sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian pendapat kami atas Rancangan Perda tersebut diatas, dan kami mengharapkan Raperda dimaksud pada hari ini dapat disetujui, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya akan kami sampaikan pendapat tentang LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan pada tanggal 4 April 2019 yang lalu, melalui sidang paripurna DRRD Kabupaten Temanggung dan telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung sesuai jadwal pembahasan yang telah ditetapkan melalui tahapan kajian yang mendalam dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Hasil pembahasan LKPJ Bupati Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 antara DPRD dengan eksekutif yang dituangkan dalam catatan-catatan strategis dan rekomendasi merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Temanggung selaku wakil masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018. Sehingga saran, masukan, dan kritikan, baik yang menyangkut substansi materi maupun redaksi adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah, kami terima dengan baik.

Sidang dewan yang terhormat,

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku disertai dengan komitmen untuk mengkaji dengan seksama catatan-catatan strategis yang tercantum di dalamnya.

Saya menyadari bahwa belum seluruhnya dapat mewujudkan harapan masyarakat. Terhadap catatan-catatan dari panitia Khusus LKPJ yang menurut kacamata DPRD belum sesuai dengan target, kiranya hal ini perlu kita ketahui bersama dengan arif dan bijaksana, karena perlu kita ketahui bersama bahwa di satu sisi hal tersebut lebih ditimbulkan oleh kondisi-kondisi obyektif salah satunya adalah keterbatasan kapasitas keuangan daerah, yang tidak selalu mampu mencukupi dan mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh di sisi yang lain. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap berupaya maksimal untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Sidang Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan Temanggung yang semakin baik pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak hadirin dan segenap anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk selalu bersama-sama memberikan kepedulian dan sumbangsih kita sesuai dengan peran masing-masing.

Sekian dan terima kasih,

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua, amin,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bupati Temanggung, H.M.Al Khadziq

Pimpinan rapat :

Kepada saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Hasil Pembahasan Pansus I dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018 Hasil Pembahasan Pansus 2.

Sebelum kami akhiri, melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap anggota Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 DPRD, dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

yang telah mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk menyelesaikan tugas pembahasannya, sehingga dapat selesai sebagaimana yang telah dijadwalkan.

Atas nama DPRD kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, para Anggota DPRD, dan semua hadirin yang telah mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD dari awal hingga akhir.

Akhirnya seraya memanjatkan syukur Alhamdulillahirrobil'alamin, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan ke I Tahun 2019 hari ini Kamis, 25 April 2019 pukul 12.30 WIB. Kami tutup ----- ketuk palu 3 kali.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 25 April 2019

Sekretaris Rapat

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001